

Analisis Resepsi Kader PKB Bandung Terhadap Isu Reformasi Birokrasi pada Pidato Pelantikan Presiden di Televisi

Bagas Prawira¹⁾, Heppy New Year Haloho²⁾

Ilmu Komunikasi, Fakultas Industri Kreatif, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: bagas.prawira1101@gmail.com

²⁾ Email: heppy.haloho@kalbis.ac.id

Abstract: *The President addressed this issue in his speech. This study seeks to determine how Bandung PKB party cadres responded to President Joko Widodo's second inaugural address's discussion of bureaucratic reform. This investigation employs the encoding-decoding theory and a constructivist methodology. The data collection technique for this qualitative study is in-depth interviews. This study classifies audience reception into three distinct categories: dominant-hegemony, negotiations, and opposition. The results of in-depth interviews indicate that each informant interprets the content of the speech differently. The differing perspectives of the five informants demonstrate this. One informant holds the Hegemony-Dominant position, two hold the Negotiation position, and the remaining two hold the Opposition position.*

Keywords: *audience reception, bureaucratic reform, encoding-decoding, president's speech.*

Abstrak: *Masyarakat mengeluhkan kondisi yang pelik dan berbelit-belit ini, demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kader PKB Bandung menyikapi isu reformasi pegawai pada masa pelantikan kedua Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan teori encoding-decoding dan metodologi konstruktivis. Dengan menggunakan metodologi pendekatan, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Studi ini menggunakan tiga audiens: hegemoni-dominan, negosiasi, dan oposisi. Dapat disimpulkan dari temuan wawancara mendalam bahwa setiap informan memiliki perspektif berbicara yang unik. Hal ini terlihat dari sudut pandang kelima informan yang hadir. Satu informan menduduki posisi Hegemoni-Dominan, sedangkan dua lainnya masing-masing menduduki posisi Negosiasi dan Oposisi.*

Kata kunci: *encoding-decoding, pidato presiden, reformasi birokrasi, resepsi khalayak.*

I. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi menjadi salah satu dari 5 gagasan yang di garis bawahi oleh Presiden Jokowi sebagai agenda pemerintah untuk masa jabatannya dalam 5 tahun ke depan. Menurut Sedarmayanti (2010:75), tujuan utama reformasi adalah mengubah struktur, perilaku, dan kebiasaan sistem lama.

Presiden Jokowi menekankan pada penyederhanaan segala bentuk macam birokrasi di pemerintahan. Berkaca pada

kondisi Indonesia, birokrasi merupakan salah satu permasalahan yang memang sudah lama ada di masyarakat. Gambaran nyata rumitnya birokrasi di Indonesia ini dapat ditemukan pada banyak instansi yang bersifat sipil juga militer. Akibat birokrasi panjang dan rumit ini, tidak sedikit menghasilkan output yang kurang maksimal seperti di keluhkan oleh Jokowi dalam pidatonya, bahwa pesan yang di sampaikan bukan hanya harus di sampaikan saja, tetapi pihak yang menyampaikan harus memastikan bahwa pesan tersebut

diterima dan dipahami oleh masyarakat. Penyederhanaan eselon yang diusulkan Jokowi sebagai program kerjanya merupakan reformasi birokrasi yang diharapkan dapat membawa Indonesia lebih baik ke depannya.

Jika dibandingkan dengan visi misi yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya pada tahun 2014 lalu, tidak ada pencapaian spesifik yang ingin diraih dalam 5 tahun jabatannya ke depan, beliau hanya menekankan pada persatuan kesatuan dan gotong royong bersama untuk bekerja dalam membangun Indonesia ke depan. Pada pidato pelantikan 20 Oktober 2019 lalu, Jokowi secara jelas memiliki target spesifik berupa angka yang harus dicapai dalam 5 tahun masa jabatannya hingga 2024 nanti. Kerja yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi kini lebih bisa diukur dan terlihat, sejauh apa kesuksesannya dan bagaimana hasilnya. Salah satunya adalah mengenai reformasi birokrasi yang dinyatakan akan dilakukan dengan melakukan pemangkasan pada eselon-eselon di pemerintahan hingga menjadi 2 level saja.

Selain reformasi birokrasi, ada topik lain yang disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam isi pidatonya tersebut. Beliau menjabarkan secara jelas lima visi yang akan dikerjakannya dan kemudian disebut sebagai program kerja dalam lima tahun masa jabatannya hingga 2024 nanti. Namun, lima hal yang disebut sebagai fokus kinerja pemerintahan beliau dalam lima tahun ke depan tersebut sama sekali tidak menyinggung isu yang justru sudah ada di Indonesia dan masih hangat. Melemahnya KPK akibat DPR mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September 2019 menjadi salah satunya. Pengesahan UU tersebut memberikan dampak pada kinerja KPK, yaitu mempersempit dan memperlambat ruang gerak KPK dalam memberantas pelaku korupsi yang ada di pemerintahan.

Selain tidak membahas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, Presiden Jokowi juga tidak membahas beberapa persoalan penting lainnya dalam pidatonya. Padahal topik tersebut seharusnya menjadi isu pertama yang diangkat dalam pidato Kepresidenan Jokowi. Isu ini begitu marak diberitakan oleh beberapa media karena konflik yang terjadi begitu meresahkan namun upaya yang dilakukan untuk meredam situasi tersebut sangatlah minim yaitu konflik di Papua. Permasalahan lain yang muncul berdekatan dengan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 adalah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Riau. Kebakaran tersebut begitu cepat meluas yang menyebabkan bencana asap di sejumlah wilayah Kalimantan dan Riau.

Isu lingkungan yang di alami Indonesia ini terbilang parah dan butuh perhatian ekstra untuk penyelesaiannya menurut para pengamat lingkungan. Namun hal ini tak sebanding lurus dengan nyatanya di lapangan. Karena isu lingkungan bukan menjadi salah satu dari 5 program kerja yang di sampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya tersebut.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, juga dikenal sebagai Jokowi, disapa berbeda dari para pemimpin Indonesia sebelumnya. Banyak hal yang membuatnya berbeda dari Presiden RI pada periode sebelumnya sehingga masyarakat banyak yang mulai tertarik pada momen-momen apa yang saja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu sendiri. Salah satunya adalah momen yang ditunggu-tunggu yaitu momen pelantikan Presiden periode kedua.

Mengingat ini adalah periode kedua Jokowi menjabat sebagai Presiden, maka pidato yang dibacakan oleh beliau pada 20 Oktober 2019 kemarin bukanlah pidatonya yang pertama. Jika dibandingkan dengan pidato pertama, ditemukan banyak perbedaan yang cukup signifikan dalam kedua isi pidato

tersebut. Pada pidato perdananya lima tahun lalu, Presiden ke – 7 RI tersebut lebih memfokuskan pada semangat untuk bekerja.

Pidato kenegaraan pada pelantikan Presiden biasanya merangkum apa yang menjadi visi dan misi dan harapan untuk kepemimpinan Presiden dalam periode 5 tahun ke depan. Dalam pidato tersebut Presiden Jokowi mengangkat berbagai fokus kerjanya pada masa 5 tahun yang akan datang. Lima program kerja disebutkan di seluruh presentasi: pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan, dan transformasi ekonomi. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan pihak koalisi dan partai pendukung Presiden Jokowi. Akankah pihak yang berkoalisi dengan Presiden Jokowi menyampaikan pendapat yang mendukung terhadap kebijakannya. Partai Kebangkitan Bangsa memang merupakan pihak koalisi dari Presiden Jokowi, namun mayoritas dari masyarakat Jawa Barat merupakan pendukung pihak oposisi atau dalam arti lain adalah pendukung dari Prabowo.

Dengan menggunakan teori *encoding-decoding* peneliti akan berupaya bagaimana kemudian informan dalam hal ini kader PKB Bandung memaknai isi pidato Jokowi mengenai reformasi birokrasi. *Decoding* dan *encoding* adalah sebuah teori yang menekankan pada peran pembaca pada penerimaan pesan yang didapat, Pemaknaan tersebut bisa berbeda tergantung dari latar belakang pengalaman hidup dan budaya khalayak atau pembaca itu sendiri. Menurut teori *encoding-decoding* Stuart Hall, setiap pesan atau makna yang dikomunikasikan terdiri dari serangkaian peristiwa sosial mentah yang mengandung ideologi (Store, 2010:11-12).

II. METODE PENELITIAN

Paradigma secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dasar pengetahuan. Dalam *The Structure of Scientific Revolution*, Thomas S. Kuhn menyatakan paradigma sebagai *basic belief system* yang kemudian dikembangkan para ahli setelahnya hingga dewasa ini banyak diartikan sebagai “cara berfikir” atau “pendekatan terhadap masalah” (Ronda, 2018:3).

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Dalam studi ini, paradigma pengetahuan konstruktivis menegaskan bahwa pengetahuan dan kebenaran objektif dihasilkan dari perspektif. Pengetahuan dan kebenaran diciptakan oleh pikiran; mereka tidak ditemukan.

Paradigma ini mencerminkan sifat realitas yang dinamis dan multifaset. Plural dalam arti bahwa aktor manusia dapat membengkokkan dan membentuk realitas melalui tindakan mereka yang disengaja. Peneliti memasukkan informasi yang beredar di dunia sehingga dapat diolah, dibuat, dan kemudian disebarluaskan sebagai informasi baru (Ronda, 2018: 14). sebagai pengetahuan baru (Ronda, 2018: 14).

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengetahui bagaimana pidato Presiden Jokowi diterima khalayak. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alami dan memanfaatkan berbagai metode yang alami. (Moleong, 2011: 6)

Selain itu, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, serta individu dan kelompok (Sukmadinata, 2009:53-60). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena melalui pengumpulan data dalam jumlah yang banyak. Terlepas dari kenyataan bahwa populasi dan ukuran sampel sangat kecil, keduanya tidak menjadi prioritas dalam penyelidikan ini. Jika data yang dikumpulkan sudah lengkap dan cukup dapat menjelaskan fenomena yang diselidiki, tidak perlu pengambilan sampel tambahan. Di sini, fokusnya adalah pada kedalaman data (kualitas), bukan kuantitas data (kuantitas) (Kriyantono, 2012: 56-57).

Jenis Peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan suatu situasi atau peristiwa. Penyelidikan ini tidak memeriksa atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Selain penelitian historis dan eksperimental, beberapa penulis menerapkan metode deskriptif untuk semua jenis penyelidikan lainnya. Metode deskriptif disebut sebagai penelitian (Wood dalam Rakhmat, 2012: 24)

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang atribut dan detail populasi atau objek tertentu. Peneliti sudah memiliki konsep dan kerangka konseptual. Peneliti mengoperasionalkan konsep melalui kerangka konseptual (theoretical foundation) untuk menghasilkan variabel dan indikator yang sesuai (Kriyantono, 2012:69).

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau peristiwa yang sedang berlangsung. Masalah aktual yang ada pada saat penelitian dilakukan

ditekankan. Peneliti berusaha menggambarkan peristiwa dan peristiwa yang menarik tanpa memberikan pertimbangan khusus melalui penelitian deskriptif (Noor, 2011: 34-35). Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara mendalam ditinjau dari pemahaman dan interpretasi Kader PKB Bandung terhadap pidato Presiden Jokowi.

Karena setiap anggota memiliki pendapatnya masing-masing, maka audiens dianggap aktif dalam proses analisis. Analisis khalayak atau upaya untuk memahami proses pembuatan makna khalayak ketika mengkonsumsi sebuah teks media.

Analisis resepsi mengasumsikan bahwa khalayak memiliki otonomi untuk menghasilkan dan mereproduksi makna dari teks yang mereka konsumsi. Analisis resepsi juga dapat digunakan untuk melihat dan memahami tanggapan penerimaan, sikap, dan makna yang dibentuk oleh khalayak atau pembaca terhadap isi karya sastra dan tulisan dari majalah, tayangan ulang film atau drama, atau novel yang telah dibaca sebelumnya (Ida , 2014:161).

Menerima pesan dimulai dengan proses decoding, yang merupakan kebalikan dari encoding. Decoding adalah proses menerjemahkan atau menafsirkan pesan fisik ke dalam format yang dapat dimengerti oleh penerimanya (Morissan, 2013: 21).

Menurut Stuart Hall dalam (Morissan, 2013: 550-551), khalayak memecahkan kode pesan media dengan mengadopsi salah satu dari tiga kemungkinan posisi:

1. Posisi Dominasi Hegemoni

Kondisi hegemoni dominan adalah ketika khalayak menerima pesan media. Ini adalah situasi di mana media menyampaikan pesannya menggunakan kode budaya masyarakat yang dominan. Dengan kata lain, budaya dominan dimiliki oleh media dan penonton.

Media harus memastikan bahwa pesan mereka konsisten dengan budaya dominan masyarakat. Jika, misalnya, pesan iklan di media ditafsirkan seperti yang dilihat oleh media, maka ideologi dominan dimiliki oleh media, pesan, dan khalayak.

2. Posisi Negosiasi

Posisi Negosiasi adalah sikap di mana audiens menerima ideologi dominan secara umum, tetapi menolak penerapannya dalam keadaan tertentu (seperti yang dikatakan Stuart Hall: audiens mengasimilasi ideologi utama secara umum tetapi menentang penerapannya dalam kasus-kasus tertentu). Dalam hal ini, perspektif baru menerima ideologi dominan, tetapi akan menerapkan beberapa aplikasi yang disesuaikan dengan norma budaya lokal.

3. Posisi Oposisi

Metode terakhir yang digunakan audiens untuk memecahkan kode pesan media adalah oposisi, yang terjadi ketika audiens memodifikasi atau mengganti pesan atau kode media dengan pesan alternatif. Penonton menolak pesan makna yang disampaikan oleh media dan menerapkannya pada perspektif mereka sendiri tentang subjek yang disampaikan oleh media. Stuart Hall mengakui bahwa media membingkai pesan dengan maksud terselubung persuasi, tetapi berpendapat bahwa khalayak dapat menghindari diserap oleh ideologi dominan. Namun, penerimaan audiens terhadap pesan persuasi seringkali cukup halus. Para ahli teori kajian budaya tidak percaya bahwa khalayak mudah ditipu oleh media; namun, khalayak sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah dipengaruhi dan telah mengadopsi ideologi dominan.

Televisi adalah media audiovisual yang menggunakan teknik audio dan visual untuk menyampaikan informasi.

Televisi adalah media massa dengan banyak aplikasi. Tujuan televisi adalah sebagai sumber informasi bagi khalayak nasional dan internasional. Data ini berguna untuk meningkatkan pemahaman konsumen media terhadap berita (McQuail, 2011: 63).

Sebagai salah satu bentuk komunikasi, televisi telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan masyarakat manusia. Kehadiran stasiun televisi di Indonesia tidak menghalangi produksi berbagai program yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi. Televisi hanyalah media untuk berkomunikasi dengan khalayak, tetapi siaran televisi dikemas untuk memenuhi kebutuhan khalayak yang dituju (Morissan, 2011:200).

Menurut aturan yang mengatur bentuk program, ada dua jenis program televisi yang berbeda: hiburan dan informasi. Sinetron, film (FTV), dan program animasi terdiri dari program drama. Format program musik, games, reality show, show, komedi, variety show, repackaging, dan talk show merupakan contoh program non-dramatis (Latief dan Utud, 2017: 233).

Televisi sebagai institusi dan media (McQuail, 2011:40):

Aspek media - Konten sangat beragam - Saluran audiovisual

- Dianggap domestik, intim, dan pribadi.

- Intensitas rendah dan kurangnya keterlibatan

Fitur kelembagaan

- Organisasi dan teknologi yang kompleks

- Tunduk pada batasan dan aturan sosial

- Signifikansi nasional dan internasional - Terlihat oleh banyak orang

Televisi, seperti halnya radio, merupakan media massa yang beroperasi secara linier atau searah. Isi audio visual yang singkat, padat, jelas, santun berisi berita, informasi, hiburan, dan pendidikan bernuansa yang hanya disampaikan satu arah. Ini berarti bahwa umpan balik tidak dapat diperoleh secara instan secara timbal balik. (Oramahi, 2015:7)

Pidato adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada banyak pendengar. Oleh karena itu, setiap pidato harus menyertakan pembicara, audiens, dan isi pidato. Inilah yang dimaksud dengan ilmu retorika dengan unsur-unsur tuturan. (Azis, 2019:16)

Menurut Yani (Rahim, 2010: 76), retorika adalah ilmu berbicara atau seni berbicara di depan umum atau berpidato untuk mencapai efek yang diinginkan.

Berikut ini adalah, menurut Retorika Aristoteles, unsur-unsur retorika dalam pidato:

1. Pembicara, atau orang yang berkomunikasi secara lisan. Selain suaranya, ia dibantu oleh gerakan tangan, lawan bicara, perubahan ekspresi wajah, dan pendengar yang penuh perhatian.
2. Pembicara adalah pendengar. Mereka harus dikenali oleh presenter.
3. Bahan atau pesan percakapan, pesan yang dirancang untuk menggugah pikiran dan emosi pendengar (Dipodjodjo, 1984:30) dalam bahasa Indonesia (Azis, 2019:16)

Retorika membutuhkan pertimbangan tidak hanya isi, tetapi juga

gaya dan keanggunan bahasa. Retorika kontemporer digunakan dalam bentuk pidato atau public speaking, yang dalam dakwah terdiri dari khotbah dan tabligh yang ditujukan kepada khalayak yang banyak (Arifin, 2009: 260).

Menurut (Yanurita, 2012:20), ada juga beberapa tujuan berbicara, antara lain:

1) Tujuan pidato informatif adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada audiens atau untuk memberi mereka sesuatu yang menarik.

2) Persuasif

Pidato persuasif mendorong, membujuk, dan mengajak pendengarnya untuk melakukan sesuatu.

3) Argumentative Pidato yang dimaksudkan untuk membujuk pendengarnya

4) Deskriptif

Pidato dimaksudkan untuk menggambarkan atau menggambarkan suatu keadaan.

5) Relaksasi

Pidato rekreasi dimaksudkan untuk menghibur atau menghibur penonton.

6) Edukatif

Pidato edukatif berupaya menekankan pada aspek-aspek pendidikan.

7) Entertain

Tujuan dari speech entertainment adalah untuk memberi energi kembali pada audiens yang lebih santai.

Menurut Kriyantono (2012:95),

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau prosedur yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan

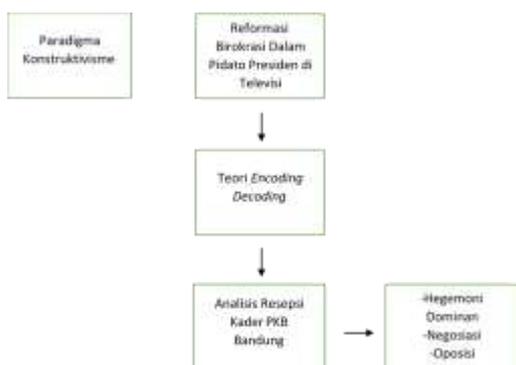
data. Ketika beberapa teknik atau metode pengumpulan data digunakan.

Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data (wawancara). Ketika melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang dapat diteliti dan ketika jumlah responden sedikit dan informasi yang lebih mendalam diinginkan dari responden, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2015: 137). Wawancara mendalam digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang didapatkan oleh Kader PKB Bandung terhadap isu reformasi birokrasi dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo di televisi.

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bergabung
H.M. Sidkon Djampi	Laki-laki	Sekretaris PKB Jawa Barat	1998 - sekarang
Putri Tahta Fadilah	Perempuan	Pengurus Perempuan Bangsa	2016 - sekarang
Ahmad Riyadi	Laki-laki	Tenaga Ahli Fraksi PKB	2017 - sekarang
Imbar Usman	Laki-laki	Wakil Sekretaris Dewan Suro	1998 – sekarang
Rizky Halala	Laki-laki	Garda Bangsa	2018 – sekarang

Tabel 1 Informan Kader PKB Bandung

(Sumber: Olahan Peneliti)



Gambar 1 Kerangka Berpikir

(Sumber: Olahan Peneliti)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.5 Pembahasan

Dari analisis yang dilakukan, terlihat jelas bahwa meskipun berada di pihak yang sama, kelima informan yang dipilih untuk studi yang berbeda berdasarkan kepentingan terkait reformasi mereka tidak memiliki pemahaman yang sama.

Ahmad Riyadi memperlihatkan sikapnya sebagai Hegemoni – Dominan, kesimpulan ini didapatkan berdasarkan pernyataan-pernyataannya dari hasil wawancara peneliti yang memperlihatkan jawaban positif dan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Ahmad Riyadi selalu menilai positif birokrasi yang telah berjalan bahkan mendukung semua keputusan yang sudah dan akan dilakukan dalam pemerintahan Jokowi yang baru. Posisi PKB sebagai partai koalisi memperkuat keyakinan beliau terhadap sosok Presiden Jokowi yang ditunjukkan dengan dukungan positif.

Sidkon Djampi dan Rizky Halala memperlihatkan sikapnya sebagai Negosiasi, kesimpulan ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara peneliti yang mengangkat isu reformasi birokrasi dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi. Walaupun berada dalam partai koalisi Presiden Jokowi, keduanya tidak ragu untuk mengemukakan hal yang masih buruk tetapi tidak lupa untuk mengangkat hal yang sudah baik yang telah terlaksana di pemerintahan Presiden Jokowi ini.

Putri Tahta Fadillah dan Imbar Usman memiliki pendapat oposisi, mereka menilai kebijakan tersebut sebagai suatu hal yang mustahil untuk diterapkan di Indonesia meskipun kebijakan tersebut mereka pandang sebagai hal yang baik dan tepat dilakukan, namun berdasarkan pengalaman mereka melihat sejauh mana perkembangan birokrasi di Indonesia mereka menimbang bahwa kebijakan tersebut sebagai hal yang tidak mungkin untuk diaplikasikan mengakibatkan pendapat yang pesimis dan cenderung tidak mendukung kepada isu reformasi birokrasi yang diangkat oleh peneliti.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam tersebut peneliti menyimpulkan bahwa satu informan memasuki kategori Hegemoni-Dominan, dua informan memasuki kategori posisi Negosiasi dan dua informan memasuki kategori Oposisi. Peneliti menemukan bahwa setiap informan memiliki pandangan yang berbeda ketika memaknai suatu pesan. Status koalisi Partai PKB dengan Presiden Jokowi tidak mempengaruhi jawaban informan dalam memaknai pesan pada pidato Presiden, dikarenakan perbedaan ini terjadi karena latar belakang yang berbeda-beda pada informan.

Tabel 2 Posisi Informan

Informan	Posisi
H.M Sidkon Djompi	Negosiasi
Putri Tahta Fadillah	Oposisi
Ahmad Riyadi	Hegemoni - Dominan
Imbar Usman	Oposisi
Rizky Halala	Negosiasi

(Sumber: Olahan Peneliti)

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kasus Kader PKB Bandung ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Indonesia dan sikap yang berbeda terhadap Presiden Joko Widodo, terbukti dengan adanya perbedaan reformasi yang mereka ajukan. Pidato pelantikan Presiden Joko Widodo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif. Analisis audiens digunakan untuk menganalisis hasil wawancara yang menghasilkan makna unik untuk setiap pesan informan.

Setelah melakukan penelitian berdasarkan wawancara mendalam yang menghasilkan interpretasi pesan yang berbeda-beda dari masing-masing informan, peneliti menemukan hasil dengan pemaknaan yang masuk dalam tiga kategori posisi: satu informan termasuk dalam posisi Hegemoni-Dominan, dua informan termasuk dalam posisi Negosiasi, dan dua informan termasuk dalam posisi Oposisi. Teori decoding-encoding ini valid dan berpengaruh pada khalayak sasaran karena meskipun mereka adalah anggota kelompok yang sama, mereka memiliki latar belakang yang beragam.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, M.A. (2019). *Public Speaking Gaya Dan Teknik Pidato Dakwah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Latief, & Utud. (2017). *Kreatif Siaran Televisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- McQuail, D. (2011) *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana

- Morissan, M.A. (2013). *Teori Komunikasi Individual Hingga Massa*. Jakarta: Kencana
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group
- Oramahi, H.A. (2015). *Jurnalistik Televisi*. Jakarta: Erlangga
- Rakhmat, J. (2012). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rahim, A. (2010). *Retorika Haraki*. Solo: Era Adicitra Intermedia
- Ronda, A.M. (2018). *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi: Tinjauan Teoritis, Epistemologi, Aksiologi*. Tangerang: Indigo Media.
- Sedarmayanti. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama
- Storey, John. (2010). *Cultural Studies Dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Yanuarita, A. (2012). *Langkah Cerdas Mempersiapkan Pidato dan MC*. Yogyakarta. Teeranova Books.